

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- a. Pada dasarnya kebijakan keamanan AS di Timur Tengah secara umum adalah bagian dari kebijakan keamanan AS secara global. Setelah melalui kebijakan pembendungan (*containment policy*) dan Perang Dingin (*cold-war*) (1949-1989); kemudian kebijakan keterlibatan (*engagement policy*), yang dipadu dengan kebijakan perluasan (*enlargement policy*) mulai masa Presiden ke-42 AS Bill Clinton; kemudian pasca tragedi WTC 11/9/2001, kebijakan keamanan Presiden ke-43 AS George W. Bush berubah drastis. Bush mengasumsikan AS sedang menghadapi keadaan darurat melawan terorisme, sehingga Bush mengeluarkan “*Bush Doctrine*” yang menilai negara di dunia dibagi dua (“kami” atau “mereka”), terorisme akan diperlakukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, dan doktrin *pre-emptive-strike* (menyerang duluan sebelum diserang).
- b. Terdapat perbedaan strategi dalam kebijakan keamanan di Timur Tengah antara Presiden Bush dan Presiden Barrack Obama, yang cenderung tampak lebih melunak, dan lebih bisa membedakan antara terorisme dengan Islam. Namun kebijakan keamanan di lapangan hampir sama saja. Jika Bush melaksanakan invasi terhadap Afghanistan dan Irak, maka Obama pun menginvasi Libya. Jika Bush memberlakukan kebijakan drones (*drones policy*), maka Obama pun melanjutkannya bahkan lebih banyak korban manusia dalam hal *drones policy* di masa Obama daripada di masa Bush.
- c. Banyak hal yang melatarbelakangi kebijakan keamanan AS terhadap Timur Tengah di masa Bush maupun Obama. Namun secara umum kedua presiden sama-sama mengambil kebijakan keamanan yang didasarkan pada reaksi terhadap gerakan terorisme dunia, yang pemicu

d. utamanya adalah penyerangan terhadap gedung kembar WTC dan Pentagon. Hanya saja pada level kepentingan nasional (*national-interest*) AS, masih banyak faktor lain yang melatarbelakangi kebijakan keamanan AS di Timur Tengah, yakni dari mulai persoalan kepentingan minyak di Timur Tengah, kepentingan untuk menggulingkan regim Islam radikal, hingga pelumpuhan kekuatan militer anti-Israel.

## IV.2 Saran

- a. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:
- b. Tindakan intervensi maupun invasi militer sebuah negara atau kelompok negara kepada negara lain, hendaknya didasari atas mandat dari DK-PBB.
- c. Tindakan militer secara sepihak, akan menjadi bom waktu dalam jangka panjang, sehingga segala permasalahan internasional sebaiknya diselesaikan secara damai melalui saluran diplomasi hingga arbitrase
- d. Pihak mana pun sebaiknya tidak menerapkan standar ganda, termasuk dalam hal menerapkan definisi terorisme. Definisi terosrisme harus diberlakukan bagi siapa pun yang melakukan tindakan sebagai teroris.
- e. Hendaknya radikalisme dalam segala bentuknya ditiadakan, karena agama manapun tidak memperbolehkan melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama umat manusia, apa pun alasannya.